**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Fenomena urbanisasi yang terjadi saat ini merupakan salah satu penyebab timbulnya peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali di suatu wilayah perkotaan, dengan semakin berkembangnya suatu kota maka menjanjikan bagi para kaum urban untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Urbanisasi didefinisikan sebagai suatu proses perubahan :

“*Urbanization is a process of changes : Size, densities and composition of population, economic structure and human behavior*” *(Knox, 1994).*

Seperti halnya Knox, maka Soetomo (2009) juga menjelaskan pengertian urbanisasi sebagai suatu proses perubahan kehidupan dan tempat bagi terwujudnya masyarakat dan bentuk perkotaan yang akan menciptakan keberagaman atau heterogenitas baik dalam kota maupun pada skala wilayah.

Keadaan ini menjadikan tuntutan adanya penyediaan sarana dan prasarana perkotaan terutama kebutuhan akan hunian tempat tinggal dan infrastruktur pendukungnya. Ditinjau latar belakang pada umumnya kaum urban adalah masyarakat yang kurang siap dan tidak memiliki tingkat keterampilan maupun keahlian dalam menghadapi dampak perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu mereka yang tidak memiliki keahlian apapun otomatis akan tersingkir dan ini menimbulkan tingkat pengangguran kian bertambah, kebutuhan akan hunian tempat tinggal juga semakin meningkat.

Keadaan inilah yang menimbulkan potensi terjadinya daerah-daerah permukiman kumuh (*Slum*) dan ilegal (*Squatter*) pada suatu area yang semestinya tidak diperbolehkan ditempati. Pada intinya timbulnya kantong-kantong kemiskinan tersebut karena tingkat pendapatan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu bersaing terhadap kemajuan teknologi. Seperti definisi yang disampaikan oleh Bank Dunia, sebagai berikut :

“*Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society*” (*World Bank, 1990).*

Inti kemiskinan itu dapat dilihat pada standar kehidupan masyarakat bawah dan tentunya ini terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat bawah itu sendiri. Sedangkan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap pengadaan perumahannya dan diperhitungkan pula dengan keperluan perbaikan dan penggantian rumah tempat tinggal yang masih ada. Tingkat kemiskinan ini mempengaruhi pelayanan fasilitas, baik itu pendidikan, kesehatan, kenyamanan (listrik, air bersih dan sanitasi). Kondisi ini menjadikan taraf hidup masyarakat bawah khususnya sosial ekonominya tidak bertambah maju.

Dengan kemunduran inilah maka tingkat daya saing masyarakat pun menjadi rendah. Sesungguhnya masyarakat bawah dengan pendapatan rendah maupun tidak berpendapatan ini memiliki kemampuan dan potensi yang dapat digali, tetapi tidak cukup mampu tanpa bantuan dan rangsangan dari pemerintah. Semua ini balik pada kemampuan masyarakatnya, dimana kemampuan masyarakatnya tidak dimiliki maka kesempatan pun tidak dapat dicapai.

Dan ini terkait dengan tingkat kemampuan masyarakat untuk membuat tempat tinggal, yang merupakan titik awal dari segala aktivitas dalam kehidupannya. Hal ini di dukung oleh Soedarsono (1992), yang mengemukakan sebagai berikut :

”Jika disuatu daerah telah tumbuh dan berkembang rumah-rumah sebagai suatu proses bermukim, yaitu kehadiran manusia dalam menciptakan ruang dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya maka dinamakan perumahan.”

Perumahan berarti adalah kumpulan dari rumah-rumah sebagai tempat bermukim manusia dalam melangsungkan kehidupannya, sedangkan permukiman adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan (Soedarsono, 1992).

Definisi permukiman menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.. Dengan beberapa definisi rumah, perumahan dan permukiman di atas menyimpulkankan bahwa aktivitas hidup manusia berawal dari rumah, dan dari rumah terbentuklah komunitas perumahan yang berasal dari kumpulan rumah-rumah. Sehingga dari perumahan terbentuklah pelayanan fasilitas perumahan dalam lingkup permukiman. Dengan terbentuknya permukiman maka lingkungannya pun dikelola dengan adanya sarana dan prasarana permukiman berupa air bersih, listrik, sanitasi, drainase, jalan dan persampahan. Selanjutnya dalam penelitian ini untuk menganalisa dari beberapa teori tersebut di atas, maka dipilihlah Kota Pangkalpinang sebagai wilayah kota pusat pembangunan yang memiliki permasalahan dengan permukiman kumuh di beberapa wilayahnya, ini akan dijabarkan sebagai berikut di bawah ini.

Keluarnya UU Nomor 27 Tahun 2000 meresmikan pembentukan Bangka Belitung sebagai provinsi baru sekaligus juga menetapkan Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah Kota Pangkalpinang saat ini kurang lebih 118,408 km2 dan memiliki 7 kecamatan diantaranya Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gabek serta Kecamatan Girimaya. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2001 sebanyak 128.732 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 jumlahnya sekitar 188.247 jiwa, berarti Kota Pangkalpinang mengalami pertambahan penduduk sebesar 59.515 jiwa dalam waktu 10 tahun terakhir.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan konstribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh. Akibat makin banyaknya permukiman kumuh dan liar yang pada gilirannya akan menjadi berat bagi pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menanganinya.

Selain itu kekumuhan tersebut juga terjadi akibat ulah dari masyarakat itu sendiri, ini terkait dengan budaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya kehidupan sehari-hari yang dimaksud seperti membuang sampah di sembarang tempat, buang air limbah KM/WC tidak di tempat seharusnya tetapi di sungai, laut, saluran, kebun hingga di perkarangan rumah tinggal. Menurut Ridlo (2001), kebanyakan permukiman kumuh berada di tempat-tempat strategis di pusat kota (sekitar pasar, dekat rumah sakit, di belakang pergudangan); di tengah kota (menempati lahan perkuburan, di tepi sungai, di belakang pertokoan); atau di pinggiran kota (dekat tempat pembuangan sampah, di atas tanggul).

Kondisi permukiman kumuh tersebut, tentunyalah permasalahan yang dihadapi semakin bertambah, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, budaya hingga ke masalah psikologi masyarakatnya. Seperti di permukiman kumuh yang terdapat di Kota Pangkalpinang, banyak terdapat masyarakat yang miskin karena tingkat pendapatan kurang sehingga menimbulkan tindakan kriminal juga meningkat, seperti perampokan, maling hingga pembunuhan.

Meningkatnya permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang pemerintah kota sendiri mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Walikota Pangkalpinang No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010 tentang penetapan titik-titik lokasi kawasan kumuh yang tersebar enam kecamatan, diantaranya Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Lontong Pancur (Kecamatan Pangkalbalam), Kelurahan Gedung Nasional dan Kelurahan Opas Indah (Kecamatan Taman Sari), Kelurahan Parit Lalang (kecamatan Rangkui), Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Taman Bunga (Kecamatan Gerunggang), Kelurahan Semabung Lama, Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan).

Titik lokasi yang masuk kedalam kategori kawasan kumuh ini perlu diprioritaskan penanganannya agar dapat terfokus dalam pengaturannya sehingga langkah-langkah yang dlakukan dalam menganalisis kawasan yang menjadi prioritas penanganan antara lain dengan memberikan penilaian pada setiap variabel, menentukan kategori setiap kriteria serta menentukan kawasan prioritas penanganan. Kriterian penilaian yang digunakan untuk menilai usulan kawasan prioritas adalah menggunakan pedoman teknis peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (UU Nomor 1 Tahun 2011).

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka pemerintah kota sepatutnya memeratakan pembangunan dan memberikan program-program pembangunan yang bersifat meremajakan kembali permukiman kumuh yang ada dan serta bersifat memberdayakan masyarakat sehingga terwujudkan suatu masyarakat yang beradab. Suatu kawasan permukiman yang tertata dengan baik sesuai dengan fungsinya mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, budaya dan psikologi masyarakatnya.

Menurut Cheema (1986) dalam pembangunan kota, pemerintah di negara berkembang memiliki 3 tipe kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan kota, yaitu : (1) Menggusur perkampungan kumuh dan rumah-rumah liar yang ada; (2) Mengurangi jumlah daerah perkampungan miskin dengan memindahkan mereka dan menempatkan kembali di daerah baru di luar kota; (3) Melegalisasi perkampungan kumuh dengan renovasi struktur yang ada dan memberikan bantuan dalam perbaikan lingkungan perumahan mereka.

Oleh karena itu perencana dan pemerintah diharapkan untuk berusaha meningkatkan pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi permukiman kumuh dan rumah-rumah liar, sedangkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, pasal 27 yaitu : (1) Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas permukiman; (2) Peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Berupa kegiatan-kegiatan : perbaikan atau pemugaran; peremajaan; pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan; (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Isi pada pasal 28 yaitu : (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lingkungan permukiman sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni; (2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat, melaksanakan program peremajaan lingkungan kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni; (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

* 1. **Perumusan permasalahan**

Peningkatan urbanisasi yang terjadi setelah adanya perkembangan pembangunan di Kota Pangkalpinang menjadi tidak terkendali ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk dari tahun 2001 sebanyak 128.732 jiwa sampai dengan tahun 2011 sebanyak 188.247 jiwa, berarti Kota Pangkalpinang mengalami pertambahan penduduk sebesar 59.515 jiwa. Sehingga berdampak pada munculnya kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai, lahan hijau, tanah-tanah kosong maupun daerah pantai. Keberadaan aktivitas permukiman padat penduduk yang semakin berkembang di Kota Pangkalpinang ini, menimbulkan berbagai permasalahan bagi penataan ruang kawasan pusat kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

* Kekumuhan kawasan permukiman ditinjau dari aspek fisik, yang terlihat dari:

- Ketimpangan tampilan fisik bangunan yang terjadi di kawasan studi yaitu adanya bangunan mewah atau modern di kawasan perdagangan berdampingan dengan bangunan tradisional sederhana di permukiman. Bangunan sektor formal yang berbaur dengan sektor informal yang liar dan tidak tertata,

- Munculnya bangunan-bangunan tidak permanen baru di badan jalan maupun di trotoar yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan kenyamanan pengguna jalan,

- Pemanfaatan daerah sungai oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi, yang menjadikan terganggunya fungsi sungai secara maksimal,

- Kumuhnya permukiman akibat aktivitas kawasan yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan lingkungan hunian menjadi tidak sehat dan tidak nyaman untuk ditinggali,

- Tidak berfungsinya saluran drainase kota di kawasan tersebut secara optimal,

- Sampah dan limbah akibat aktivitas warga yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan pemandangan yang kotor,

- Kurangnya sarana prasarana juga kurang terpeliharanya sarana prasarana (jalan lingkungan, tempat sampah, MCK umum)

* Terlalu padatnya jumlah penduduk, yang kurang seimbang dengan daya tampung ruang hunian dan penataan ruang yang kurang tepat.
	1. **Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah Bagaimana mencari prioritas permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang serta membuat penanganannya ditinjau dari PERMEN Nomor 1 Tahun 2011?

* 1. **Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian**
		1. **Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merumuskan prioritas permukiman kumuh yang telah di tetapkan berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010 serta memberikan alternatif penyelesaian masalah berupa rekomendasi perencanaan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan fungsi dan kualitas Kota Pangkalpinang.

* + 1. **Sasaran**

Berdasarkan perumusan tujuan yang telah dijabarkan seperti di atas, maka dalam penyusunan laporan ini, sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Identifikasi permasalahan permukiman kumuh yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan pada suatu lokasi, sehingga dapat mengindikasikan ke dalam klasifikasi tingkat kekumuhan
2. Identifikasi pertimbangan lain (non fisik) merupakan bagian dari tahapan identifikasi yang mempengaruhi efektifitas dari program penanganan
3. Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan legalitas lahan pada obyek kajian setiap permukiman kumuh yang difokuskan pada status lahan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan persyaratan administrasi bangunan
4. Menentukan skala prioritas serta penanganan permukiman kumuh dengan mengkombinasikan hasil analisis tingkat kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan
5. Membuat konsep dan strategi
	* 1. **Manfaat**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga terciptanya mendukung program MDGs (sebagai dukungan data kota tanpa kumuh 2020).

* 1. **Ruang Lingkup**
		1. **Ruang Lingkup Substansi**

Adapun ruang lingkup materi studi yang akan dikaji dalam penyusunan laporan ini dibatasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti identifikasi permasalahan kekumuhan, identifikasi pertimbangan lain dan identifikasi legalitas lahan, untuk lebih jelas dapat dijabarkan pada berikut ini:

1. Identifikasi Permasalahan Kekumuhan yang meliputi :
* Kondisi bangunan : Keteraturan, kepadatan, persyaratan teknis
* Kondisi jalan lingkungan : Cakupan pelayanan dan kualitas jalan
* Kondisi drainase lingkungan : Persyaratan teknis dan cakupan pelayanan
* Kondisi penyedian air minum : Persyaratan teknis dan cakupan pelayanan
* Kondisi pengelolaan air limbah : Persyaratan teknis dan cakupan pelayanan
* Kondisi pengelolaan sampahan : Persyaratan teknis dan cakupan pelayanan
* Kondisi pengamanan kebakaran : Persyaratan teknis dan cakupan pelayanan
1. Identifikasi non fisik yang meliputi :
* Nilai strategis lokasi : Fungsi strategis kawasan/wilayah
* Kepadatan penduduk : Kepadatan penduduk pada lokasi
* Potensi sosial ekonomi : Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi
* Dukungan masyarakat : Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan
* Komitmen pemda : Komitmen penanganan oleh pemda
1. Identifikasi legalitas lahan yang meliputi :
* Status tanah : Kejelasan status tanah masyarakat
* Kesesuaiaan RTR : Zona peruntukan permukiman
* Persy Adm Bangunan (IMB) : Bangunan telah memiliki IMB
1. Membuat arah penanganan permukiman kumuh
	* 1. **Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah studi ini adalah kawasan permukiman kumuh yang telah di tentukan atau di tetapkan oleh surat keputusan Walikota Pangkalpinang dengan No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010, serta dipadukan faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan pemukiman kumuh berdasarkan pedoman Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini:

**Tabel I.1**

**Keputusan Walikota Pangkalpinang**

**No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010/ 2 Desember 2010**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **JUMLAH KELURAHAN KUMUH** | **NAMA KELURAHAN** | **LUAS KAWASAN** |
| 1 | Pangkalbalam  | 2 Kelurahan | 1. Lontong Pancur
2. Ketapang
 | ± 8Ha± 12 Ha |
| 2 | Tamansari | 2 Kelurahan | 1. Gedung Nasional
2. Opas Indah
 | ± 4,5 Ha± 4,5 Ha |
| 3 | Rangkui | 1 Kelurahan | 1. Parit Lalang
 | ± 5,5 Ha |
| 4 | Girimaya | 1 Kelurahan | 1. Pasar Padi
 | ± 4 Ha |
| 5 | Gerunggang | 2 Kelurahan | 1. Kacang Pedang
2. Taman Bunga
 | ± 7,9 Ha± 4 Ha |
| 6 | Bukit Intan | 2 Kelurahan | 1. Semabung lama
2. Pasir Putih
 |  ± 4 Ha ± 3 Ha |
| **JUMLAH** | **10 KELURAHAN** |  **± 57 ,4 Ha** |

***Sumber: SK Walikota tentang penetapan lokasi kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang, 2010***

Pada kelurahan-kelurahan tersebut telah teridentifikasi sebagai wilayah dengan permukiman kumuh pada program-program yang pernah dilaksanakan oleh DPU Propinsi Bangka Belitung, BAPPEDA, DPU dan Bagian Sosial Sekretariat Pemerintah Kota Pangkalpinang. Beberapa program yang pernah dilaksanakan tersebut seperti *Block Grand* yang dilaksanakan oleh DPU dan BAPPEDA Kota Pangkalpinang yaitu pembangunan dan perbaikan pada prasarana permukiman yang berada di daratan maupun di atas laut/sungai.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah kecamatan dan kelurahan yang termasuk permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010/ 2 Desember 2010 dapat disajikan pada pada lembar berikutnya pada Gambar 1.1 (Peta persebaran permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang).

Gambar 1.1 (Peta persebaran permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang).

* 1. **Metodelogi Penelitian**

Metodologi penelitian ini dimulai dari metode penelitian sampai dengan teknik analisis. Hal ini dimaksud untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan penelitian. Tahapan ini dilakukan berurutan dengan mengemukakan metode penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis.

* + 1. **Pendekatan Studi**

Metode pendekatan analisis yang dipakai dalam studi ini dibagi menjadi dua jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Kualitatif terbagi atas :
* Deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara melihat keadaan obyek penelitian melalui uraian, pengertian atau penjelasan terhadap analisis yang bersifat terukur maupun tidak terukur. Dalam studi ini, pendekatan secara deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui kondisi aktivitas kawasan permukiman wilayah studi dan keberadaannya terhadap aktivitas dan tata ruang kawasan, pendekatan terhadap besaran ruang yang tersedia dan yang dimanfaatkan oleh aktivitas kawasan serta aktivitas ekonomi di sekitarnya, yang semuanya ditujukan untuk mengetahui penyebab kekumuhan lingkungan kawasan permukiman.
* Normatif, yaitu metode analisis terhadap keadaan obyek yang seharusnya mengikuti suatu aturan atau pedoman ideal tertentu. Adapun aturan baku tersebut merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum, dalam hal ini berupa peraturan-peraturan atau standar baku terhadap kawasan perdagangan, permukiman dan rencana tata ruang kawasan.
* Spatial, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan metode interaksi keruangan yang diukur dari aksesibilitas dan kesesuaian lokasi permukiman secara spasial.
1. Pendekatan Kuantitatif, digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu kawasan. Metode ini dengan menggunakan data numerik sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan analisis.
	* 1. **Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan studi terdiri dari beberapa tahapan proses penelitian antara lain tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap analisis. Tahapan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, pelaksanaan analisis yang digunakan, hingga akhirnya mendapatkan hasil atau output yang diinginkan sesuai tujuan studi.

* + - 1. **Tahap Persiapan**

Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang lengkap guna mendukung penyusunan studi ini dan masih bersifat data sekunder. Untuk menghasilkan data yang lengkap dan akurat, aspek yang perlu diperhatikan adalah dengan melihat/mengamati permasalahan yang terjadi di daerah studi. Untuk mendapatkan data-data yang akurat tersebut dilakukan persiapan, antara lain:

1. Perumusan masalah, tujuan, dan sasaran studi

Permasalahan studi diangkat berdasarkan kondisi lingkungan dan aktivitas kawasan permukiman yang berada di titik lokasi yang masuk kedalam kategori kawasan kumuh.

2. Penentuan lokasi studi

Lokasi studi yang diangkat dalam studi ini adalah titik lokasi kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010/ 2 Desember 2010.

1. Inventarisasi data-data yang ada, yaitu berupa data studi yang pernah dilakukan. Tahap ini berguna sebagai gambaran tentang studi yang akan dilaksanakan sekaligus juga untuk menyusun strategi pengumpulan data dan informasi untuk tujuan studi ini.
2. Pengumpulan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mempermudah dalam pembuatan metodologi serta pemahaman terhadap permasalahan yang diambil.
3. Penyusunan teknis pelaksanaan survai

Kegiatan ini meliputi perumusan teknis pengumpulan data, teknik sampling, jumlah dan sasaran penyebaran kuesioner (responden), rancangan pelaksanaan observasi serta format kuesioner.

* + - 1. **Tahap Pengumpulan Data**

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Masalah, tujuan, dan hipotesa penelitian, untuk sampai pada suatu kesimpulan harus didukung oleh data-data yang relevan. Relevansi data dengan variabel-variabel penelitian didasari oleh metode pendekatan masalah yang relevan (Sumaatmaja, 1998: 104).

Pada suatu proses penelitian, tahapan pengumpulan data merupakan tahapan yang harus direncanakan untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian pada proses-proses selanjutnya. Sumber-sumber data yang dibutuhkan guna penyusunan studi ini adalah:

1. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis. Di samping itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi.

2. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui survai primer yang dilakukan melalui pengamatan dan pengukuran atau penghitungan langsung (observasi) di kawasan Pancuran dan penyebaran kuesioner atau pertanyaan kepada para masyarakat yang mengetahui keadaan dan kondisi kawasan.

* Rekaman Visual

Rekaman kondisi eksisting dengan foto atau sketsa-sketsa dalam upaya merekam data-data kondisi lapangan.

* Penyerapan Aspirasi Melalui Kuisioner Langsung

Penyerapan aspirasi dilakukan untuk memperoleh informasi permasalahan dan potensi kawasan saat ini serta untuk menggali persepsi penghuni kawasan terhadap kondisi lingkungan mereka tinggal. Dengan demikian diharapkan bahwa studi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kompilasi data yang didapatkan dari instansi terkait dan masukan dari masyarakat setempat sehingga data yang diperoleh secara keseluruhan menjadi lebih akurat.

**Tabel I.2**

**Kebutuhan Data**

| **NO** | **ASPEK** | **KRITERIA** | **TEKNIK ANALISA** | **BENTUK** | **SUMBER DATA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEKUMUHAN** | **1.** | **Kondisi Bangunan** |
| **a.** | **Keteraturan Bangunan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Peta, Wawancara, Observasi |
| **b.** | **Kepadatan Bangunan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Peta, Wawancara, Observasi |
| **c.** | **Persyaratan Teknis** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Peta, Wawancara, Observasi |
| **2.** | **Kondisi Jalan Lingkungan** |
| **a.** | **Cakupan Pelayanan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Peta RIS, Wawancara, Observasi |
| **b.** | **Kualitas Jalan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Observasi |
| **3.** | **Kondisi Drainase Lingkungan** |
| **a.** | **Persyaratan Teknis** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Observasi |
| **b.** | **Cakupan Pelayanan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel |
| **4.** | **Kondisi Penyediaan Air Minum** |   |
| **a.** | **Persyaratan Teknis** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Observasi |
| **b.** | **Cakupan Pelayanan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel |
| **5.** | **Kondisi Pengelolaan Air Limbah** |
| **a.** | **Persyaratan Teknis** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Observasi |
| **b.** | **Cakupan Pelayanan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel |
| **6.** | **Kondisi Pengelolaan Persampahan** |
| **a.** | **Persyaratan Teknis** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Observasi |
| **b.** | **Cakupan Pelayanan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Observasi |
| **7.** | **Kondisi Pengamanan Bahaya Kebakaran** |  |  |   |
| **a.** | **Persyaratan Teknis** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Observasi |
| **b.** | **Cakupan Pelayanan** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Observasi |
| **B.** | **IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN** (Non Fisik) | **1.** | **Nilai Strategis Lokasi Kawasan** | Diskriptif  | Tabel dan peta | Dokumen RTR, Wawancara, Observasi |
| **2.** | **Kepadatan Penduduk** | Diskriptif  | Tabel dan peta | Statistik, Wawancara, Observasi |
| **3.** | **Potensi Sosial Ekonomi** | Diskriptif  | Tabel | Statistik, Wawancara, Observasi |
| **4.** | **Dukungan Masyarakat** | Diskriptif  | Tabel | Dokumen Kebijakan Wawancara |
| **5.** | **Komitmen Pemda** | Diskriptif  | Tabel |
| **C.** | **IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN** | **1.** | **Status Tanah** | Diskriptif Kualitatif | Tabel | Wawancara, Dokumen Pertanahan |
| **2.** | **Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR)** | Diskriptif Kualitatif | Tabel dan peta | Dokumen RTR, Wawancara |
| **3.** | **Persyaratan Administrasi Bangunan / Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** | Diskriptif Kualitatif | Tabel dan peta | Wawancara, Dokumen Perizinan |

***Sumber : Rapermen dan Analisis, 2014***

* + - 1. **Penentuan Jumlan Sample**

Studi ini menggunakan rumus slovin (sevilla 1960: 182) sampel untuk bahan studi dengan alasan bahwa peneliti tidak mungkin untuk mengamati seluruh anggota populasi, dan juga sampel penggunaan ini sangat berguna untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, tentunya jumlah populasi telah diperhitungkan terlebih dahulu.

Jumlah populasi yang digunakan adalah jumlah penduduk kawasan permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang, hal ini dikarenakan penduduk adalah objek utama studi baik sebagai penghuni ataupun pelaku aktivitas perdagangan dan jasa. Adapun penentuan jumlah sampel yang diambil dalam studi ini ditentukan dengan menggunakan formula:

**Rumus Slovin (dalam *Sevilla Consuelo G. et. al* (2007: 182)**

$ŋ\frac{N}{N.d^{2}+1}$ =

**Dimana:**

n = *Number of samples* (ukuran sampel)

N = *Total population* (jumlah seluruh anggota populasi)

d = *Error tolerance* (toleransi terjadinya galat; taraf signifikansi)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Dalam penentuan sample ini, penelitian menggunakan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

Sebagai contoh, jika yang akan kita teliti itu sebanyak 1.000 kepala keluarga di pemukiman kumuh, seperti dicontohkan di muka, dengan tingkat akurasi 95%, dan tingkat kesalahan 5%, maka besarnya sampel quisioner menurut rumus *Slovin* ini akan menjadi:

$n= \frac{1000}{1000 (0,05)^{2}+1}$ **=** $ \frac{1000}{1000 (0,0025)+1}$ **=** $\frac{1000}{2.5 + 1}$ **=** $\frac{1000}{3.5 }$ **= 285,714 ≈ 286 Orang**

Jadi contoh sampele quisioner yang di butuhkan penulis sebanyak 286, dari 1000 warga yang menempati kawasan kumuh itu sendiri.

* + 1. **Tahap Pengolahan dan Penyajian Data**

Apabila pengumpulan data sudah dilakukan, maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan dianalisis. Prosedur pengolahan data yang akan dilakukan dalam analisis kegiatan studi adalah sebagai berikut (Soehartono, 1995).

* + - 1. **Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data yang dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data sekunder selesai. Teknik pengumpulan data ini dapat digunakan sebagai penunjang studi dalam tahap analisis sesuai kebutuhan data.

Dalam pengolahan data ada beberapa hal yang harus dikerjakan yaitu:

1. Editing, yaitu meneliti/memilih kembali kelengkapan dan kebenaran atas data yang dibutuhkan.
2. Koding, yaitu dengan mengklasifikasikan frekuensi data dalam masing-masing kelompok/kategori sesuai dengan kebutuhan dalam analisis yaitu dengan pengkodean data agar data lebih mudah dicari.
3. Tabulasi, yaitu dengan mengelompokkan data untuk mempermudah proses analisis.
4. Klasifikasi, yaitu data yang dipilah berdasarkan berdasarkan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan.
5. Analisis, yaitu perhitungan data berdasarkan data yang ada dan model analisis yang sudah dikembangkan berdasarkan maksud dan tujuan studi yang sudah disusun.
	* + 1. **Teknik Penyajian Data**

Setelah data diolah dan diklasifikasi, kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu seperti berupa tabel, diagram, grafik, dan lain-lain, untuk mempermudah dalam pembacaan dan pemahaman, diantaranya adalah

1. Tabulasi, menyajikan data-data dalam bentuk tabel yang digunakan dalam menyajikan data kuantitatif.
2. Peta, menyajikan data-data yang dituangkan dalam perspektif spasial dengan menggambarkan dalam bentuk peta.
	* 1. **Teknik Analisis**

Dalam melakukan analisis ini menggunakan beberapa metode analisis seperti metode analisis deskriptif statistik, metode kualitatif deskriptif dan metode analisis tersebut perlu dibantu dengan menggunakan alat analisis *scoring* atau pembobotan untuk menentukan kriteria tingkat kekumuhan, sedangkan analisis-analisis yang akan dilakukan adalah identifikasi permasalahan kekumuhan, identifikasi pertimbangan lain (non fisik), identifikasi legalitas lahan serta penyusunan arahan penanganan permukiman kumuh yang berprioritas.

* + 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan cara berpikir dengan menuangkan dalam suatu pola yang menganalisis permasalahan dalam suatu wilayah studi, serta mencoba memberi alternatif solusi dari permasalahan yang terjadi. Kerangka pemikiran ini dituangkan dalam suatu skema diagram dengan penjelasan dari aspek-aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Keadaan kota dengan permukiman kumuhnya dan semakin pesatnya pertambahan jumlah penduduk dan keterbatasan lahan di kota, sehingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dalam masyarakatnya. Kondisi ini tentunya sangatlah terkait dengan timbulnya kantung-kantung kemiskinan dilihat dalam bentuk permukiman yang terjadi biasanya berupa permukiman kumuh (*slum area*) dan cenderung meluas. Dalam hal ini menjadikan perubahan struktur kota, karenanya perlu dikaji karakteristik permukiman kumuh ini untuk mendapatkan proses penanganan permukiman kumuh yang terjadi di Kota Pangkalpinang.

Kajian ini diawali dengan mengidentifikasi permukiman kumuh dan kondisi masyarakatnya guna menentukan upaya penanganan permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang khususnya titik-titik lokasi kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010/ 2 Desember 2010. Berdasarkan hasil kajian inilah yang nantinya akan memberikan arahan terhadap penataan fisik kawasan permukiman kumuh di Kota Pangkalpinang. Untuk alur kerangka pikir penulisan dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Persebaran kawasan kumuh di

Kota Pangkalpinang

SK Walikota No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010

Penentuan Skala Prioritas Penanganan

1. Pemugaran
2. Peremajaan
3. Pemukiman kembali

Identifikasi Legalitas Lahan:

1. Status tanah
2. Kesesuaiaan RTR
3. Persyaratan administrasi bangunan (IMB)

Identifikasi Pertimbangan Lain (non fisik):

1. Nilai strategis lokasi
2. Kepadatan penduduk
3. Potensi social ekonomi
4. Dukungan masyarakat
5. Komitmen pemda

Identifikasi Permasalahn Kekumuhan (fisik):

1. Kondisi bangunan
2. Kondisi jalan lingkungan
3. Kondisi drainase lingkungan
4. Kondisi penyediaan air minum
5. Kondisi pengelolaan air limbah
6. Pengelolaan persampahan

Penilaian untuk menghasilkan lokasi kawasan kumuh berdasarkan tingkat klasifikasi

Prioritas 1 : C5 dan C6

Prioritas 2 : B5 dan B6

Prioritas 3 : A5 dan A6

Prioritas 4 : C3 dan C4

Prioritas 5 : B3 dan B4

Prioritas 6 : A3 dan A4

Prioritas 7 : C1 dan C2

Prioritas 8 : B1 dan B2

Prioritas 9 : A1 dan A2

Berdasarkan Formula Kriteria dan Indikator tersebut, maka dapat dirumuskan Formula Penilaian (Skoring):

1. Tingkat Kekumuhan

2. Pertimbangan Lain

3. Legalitas Lahan

Karakteristik penanganan

Tipologi permukiman kumuh

Kesimpulan dan Rekomdasi

Konsep dan Strategi

**Gambar 1.2**

**Kerangka Pemikiran**

**1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas akhir ini terdiri dari lima bagian, yaitu pendahuluan, teori permukiman di pusat kota, gambaran umum wilayah studi, analisis, kesimpulan dan rekomendasi.

Secara garis besar sistematika penyusunan tesis tentang ***”Penentuan Prioritas Kawasan Kumuh dan Arahan Penanganannya di Kota Pangkalpinang”*** dapat dijelaskan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang penjelasan latar belakang permasalahan studi, permasalahan yang terungkap dalam studi, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup materi dan wilayah, serta sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN TEORI PERMUKIMAN DI PUSAT KOTA**

Berisi tentang kumpulan teori yang berkaitan dengan studi penelitian yaitu tentang permukiman di pusat kota, pertumbuhan perumahan dan permukiman di pusat kota serta karakteristik kekumuhan lingkungan permukiman.

**BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Meliputi kajian umum Kota Pangkalpinang, serta tinjauan titik-titik lokasi kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Pangkalpinang No.628/KEP/BAPPEDA/XII/2010/ 2 Desember 2010.

**BAB IV ANALISIS**

 Menganalisis variabel-variabel dan indikator yang menyebabkan kekumuhan lingkungan permukiman yang diperoleh pada tahap pendataan dengan pengamatan langsung atau observasi lapangan dan berdasarkan kuestioner yang kemudian disesuaikan dengan teori-teori yang diperoleh dan standart perencanaan permukiman yang ada. Dan pada akhirnya akan diperoleh hasil kawasan prioritas serta memberi alternative penanganannya.

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian sebagai langkah lebih lanjut.